



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

- Rapat ke : 17 (Tujuh belas)
- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : I
- Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
- Hari, Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
- Pukul : 11.00 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka.
- Pimpinan Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
- Sekretaris Rapat : Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.AP., Kasubbag Rapat Set. Komisi VI DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : 1. Pembahasan Mengenai Tindak Lanjut Permasalahan Lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dan  
2. Lain-lain
- Hadir : 1. 19 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;  
2. Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bapak Bahlil Lahadalia;  
3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);  
Beserta jajarannya.

## 1. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pada pukul 11.23 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat di skor pada pukul 11.24 WIB dan dibuka kembali pada pukul 11.28 WIB.
2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 2 Oktober 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E., M.Si.

## 2. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) agar membuat skema penyelesaian masalah lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau secara menyeluruh yang bisa diterima semua pihak.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran masyarakat terdampak dilakukan secara humanis, dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dalam pelaksanaan implementasi mengundang investor asing ke Indonesia menggunakan azas *equal treatment*.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### 3. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.26 WIB.

**MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BKPM RI**

Ttd.

**BAHLIL LAHADALIA**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI, S.E., M.Si.**  
A-318

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)**

Ttd.

**MUHAMMAD RUDI**